

Manajemen Perguruan Tinggi untuk Menghasilkan SDM Berkualitas Menghadapi Abad XXI

Supardi

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia ternyata telah menghasilkan kemajuan yang menggembarakan. Keberhasilan ini ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan umum, semakin cerdasnya kehidupan bangsa dan tetap terlindunginya segenap bangsa, serta kemampuan Indonesia dalam melaksanakan penciptaan kondisi ketertiban dunia.

Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan nasional sangat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dan tekad bangsa Indonesia dalam mendudukan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, termasuk tekad dan semangat untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Di balik berbagai keberhasilan pembangunan nasional harus diakui masih terdapat permasalahan yang menghambat, mengganggu, dan bahkan mengancam kelangsungan perkembangan pembangunan nasional di masa mendatang. Seperti kesenjangan, kurang tingginya daya saing

bangsa, kemudian ekonomi biaya tinggi, sumber daya manusia. Dari berbagai kasus penyimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan serta akibat yang ditimbulkannya, lebih banyak disebabkan oleh adanya sikap mental dan perilaku individu manusianya dibanding sebagai akibat karena sistem yang ada dan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu masalah pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) baik sebagai manusia individu maupun masyarakat dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Arah pembangunan jangka panjang kedua jelas merumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta SDM yang berkualitas. Kualitas SDM harus disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan, kendala dan sekaligus memanfaatkan peluang yang sedang dan akan terjadi pada era globalisasi dan memasuki abad ke XXI yang akan datang.

Apalagi pada era globalisasi yang didorong oleh adanya kemajuan pesat di bi-

dang teknologi, terutama teknologi telekomunikasi menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya, baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Era globalisasi akan dapat mempengaruhi stabilitas pembangunan, manakala SDM dan masyarakat Indonesia tidak mempersiapkan secara dini untuk menghadapi dan memanfaatkan peluang yang terjadi/tersedia.

Kedudukan Perguruan tinggi sebagai sub sistem pendidikan nasional memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar dan strategis dalam upaya mewujudkan SDM berkualitas yang memiliki wawasan kebangsaan. Eksistensi dan peranan perguruan tinggi harus ditingkatkan sejalan dengan upaya peningkatan manusia dan masyarakatnya agar memiliki pendidikan dan integritas kebangsaan yang tinggi. Pendidikan telah mampu menghasilkan SDM, walaupun kesenjangan antara lulusan dengan dunia luar harus diakui masih terjadi apalagi menghadapi tantangan era globalisasi.

Sementara itu dari aspek wawasan kebangsaan secara umum perguruan tinggi masih menemukan kesenjangan antara yang diharapkan dengan realitas yang terjadi. Lulusan perguruan tinggi masih memiliki wawasan kebangsaan yang masih tipis atau rendah. Terbukti kasus-kasus dan peristiwa yang terjadi di dalam kampus, antar kampus, maupun mahasiswa kampus dengan masyarakat.

Dari gambaran di atas, maka masalah yang dihadapi adalah manajemen perguruan tinggi yang bagaimana yang dapat melaksanakan tugas utama untuk dapat mengembangkan SDM berkualitas yang berwawasan kebangsaan. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dituntut memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan suatu kebijaksanaan dan strategi yang

dapat disusun, sehingga secara optimal dapat mengembangkan SDM.

Kendala dan Peluang

Dalam pembinaan dan pengembangannya perguruan tinggi menghadapi berbagai kendala dan peluang sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari era globalisasi. Globalisasi yang memberikan gambaran "kabur" terhadap batas-batas kewilayahan suatu negara, arus informasi dan komunikasi yang sangat terbuka akan memberikan dampak bagi pembinaan SDM baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi diantaranya:

Kendala

- (a). Luasnya Wilayah Indonesia dan sifatnya yang heterogen serta terdapatnya kesenjangan-kesenjangan di bidang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan potensi sumber daya manusianya, dan juga kesenjangan kesempatan dan pemerataan pendidikan tinggi.
- (b). Perguruan Tinggi belum memiliki standar Internasional, juga kinerjanya sebagai pusat pengembangan iptek masih rendah. Perguruan tinggi belum mampu dan siap menghadapi pasar global dan regional. Ini antara lain disebabkan oleh pendanaan (anggaran) pendidikan di Indonesia yang masih terbatas.
- (c). Manajemen Perguruan Tinggi belum profesional, sehingga masalah efisiensi perguruan tinggi belum tercapai dan dianggap biayanya masih sangat mahal.
- (d). Rendahnya kemampuan dan kewenangan akademiknya, akan mempe-

ngaruhi peranan dan daya saing perguruan tinggi dalam era globalisasi ke depan.

- (e). Pendapatan per kapita penduduk yang belum mampu menjangkau pemanfaatan pendidikan tinggi sebagai ciri efisiensi pengelolaan perguruan tinggi.

Peluang

- (a). Adanya otonomi dalam pengelolaan perguruan tinggi akan lebih fleksibel dalam menciptakan manajemen modern dan profesional.
- (b). Persaingan memperoleh material input terbuka, baik input mahasiswa dalam maupun mahasiswa luar negeri.
- (c). Kemudahan mendapatkan tenaga pengajar dari luar negeri yang bermutu.
- (d). Pembuatan program studi, baik jalur profesional maupun akademik lebih terbuka, sesuai kebutuhan pembangunan dan dunia bisnis.
- (e). Kesempatan menciptakan keunggulan kompetitif lebih luas, baik dari sudut ("performance") perguruan tinggi maupun lulusannya
- (f). Masyarakat yang mengglobal semakin sadar akan pentingnya pendidikan tinggi dan mutunya, sehingga bukan persoalan sebab yang penting mutu pendidikan, pelayanan dan mutu lulusannya.

SDM Berkualitas yang diharapkan

Lulusan perguruan tinggi dewasa ini secara kuantitatif tinggi, mengingat setiap tahun mampu menghasilkan lulusan sebesar 250.000 an dari PTN, PTS dan ini belum termasuk PTA dan PTK.

Sementara dari sisi kualitas belum dapat dikatakan memenuhi kualifikasi kebutuhan "user", baik dunia bisnis, kebutuhan wirausaha, maupun unit-unit organi-

sasi pemakai lainnya.

Data Biro Pusat Statistik menunjukkan lulusan perguruan tinggi pada jenjang pendidikan Strata-1 (S-1) pada program studi tertentu jumlah lulusan melebihi kebutuhan para "user" dengan rata-rata kelebihan 43%.

Menaker Abdul Latif mengakui bahwa tahun 1994 lulusan sarjana mencapai 217.180 orang dan hanya terserap ke pasar kerja sebanyak 75.470 sehingga tingkat pengangguran sarjana hasil lulusan perguruan tinggi sangat besar. Dirjen Dikti Depdikbud, menyatakan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah sebesar 10,98% untuk lulusan diploma dan 13,51% untuk lulusan S-1 atau rata-rata 12,36% (data Supas 1995).

Kesenjangan tersebut tidak mutlak menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, namun tanggung jawab semua pihak terutama juga dunia usaha, birokrasi, manusia terdidik sendiri serta masyarakat dalam arti luas. Rendahnya kualitas lulusan di samping kurang sempurnanya lembaga pendidikan dan manusia, faktor-faktor lain yang disebutkan di antaranya: (1) pemilihan program studi yang tidak tepat, (2) penguasaan akademik dan ketrampilan yang tidak sepadan dengan lapangan pekerjaan, (3) kurikulum yang kurang dapat mengantisipasi kebutuhan masyarakat, (4) kualitas dosen dan mahasiswa, serta (5) proses belajar mengajar ataupun faktor (6) kualitas perguruan tinggi asal lulusan yang bersangkutan.

Dari sisi wawasan kebangsaan ini "per-tanda" masih labil dan rentannya wawasan kebangsaan pada diri mahasiswa yang berarti juga lulusan perguruan tinggi. Beberapa contoh kasus yang dapat disebutkan di antaranya: (1) terjadinya heroik dan patriotik "sempit" dikalangan mahasiswa dengan membela daerah ataupun kampus dalam berbagai even yang menimbulkan perkelahian; (2) perkelahian antar

mahasiswa baik antar kampus maupun antar fakultas dalam kampus; (3) mereka yang menyalurkan aspirasinya melalui lembaga diluar kampus yang cenderung "bertenturan" dengan sistem yang ada dan dapat menimbulkan "keresahan" masyarakat.

SDM Berkualitas Berwawasan Kebangsaan

SDM berkualitas yang berwawasan kebangsaan adalah manusia lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dan memiliki wawasan kebangsaan yaitu wawasan Nusantara.

Sesuai dengan amanah dalam GBHN 1993 dan Kebijakan PELITA VI mengenai tujuan pendidikan serta Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 mengenai tujuan pendidikan tinggi kiranya dapat dirumuskan manusia berkualitas berwawasan kebangsaan adalah manusia Indonesia yang memiliki kualitas **nonfisik** sebagai berikut:

- a. Memiliki kualitas spiritual, yaitu kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas ini lebih pada menyangkut hubungan antara manusia dengan Penciptanya yaitu Tuhan yang Maha Esa.
- b. Memiliki kualitas pribadi yang berhubungan dengan potensi dirinya, yaitu: kemampuan akademik (kecerdasan), kemampuan kepribadian, ketanggungan, kemandirian, tanggung jawab dan keterampilan.
- c. Memiliki kualitas kebangsaan. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap mengargai jasa para pahlawan, serta berorientasi

masa depan. Mereka rela dan amat menyukai panggilan sebagai volunteer untuk bekerja di pedalaman, demi memberi nilai tambah kesuksesannya bagi bangsa dan negara. Mereka mampu menyebarkan *virus idiom global* dalam setiap komunitasnya, agar proses "transformasi kultural", meskipun dalam intensitas yang sederhana, sudah dapat dimulai, seperti misalnya: mendorong hilangnya rasa kesukuan yang sempit, menampilkan model-model tim kerja di lingkungannya dengan sistem rekrutmen anggota tim dari berbagai suku/etnis sehingga memberikan dasar "persatuan dan kesatuan" secara lebih dini.

- d. Memiliki kualitas kekaryaan. Kualitas kekaryaan dapat dilihat dari sisi kemampuan disiplin, beretos kerja, profesional, produktif, mampu menerapkan dan mengembangkan serta menciptakan IPTEK, mampu mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEK, mampu menjadi "operator" bagi proses transformasi masyarakat, memiliki kebutuhan aktualisasi yang tinggi, membentuk masyarakat haus belajar.

Manajemen Perguruan Tinggi yang diharapkan

Komponen Pendidikan

a. Dosen

Mengajar bukan semata-mata datang untuk ceramah di kelas, namun harus berperan lebih besar dengan mempersiapkan bahan pengajaran, menggunakan teknologi pengajaran, dan yang lebih penting adalah pembawa misi perubahan bersifat peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (aspek kognitif), perubahan sikap

sikap (aspek afektif) dan perubahan bersifat perilaku (aspek psikomotorik). Mahasiswa harus berubah menjadi manusia "baru yang lebih" yang dapat dilihat dalam kapasitas kemampuan menghadapi tantangan dan tuntutan pembangunan dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan ini.

Kemampuan akademik dosen dengan wujud jenjang pendidikan formal (S-2 dan S-3) harus ditingkatkan. Kemampuan ini akan memberikan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan program pengabdian pada masyarakat lebih tepat sasaran.

Kewenangan akademik (jabatan akademik) dosen harus tinggi agar dapat menunjukkan kualitas dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kualitas yang demikian akan mampu menghasilkan manusia terdidik yang berkualitas.

Kemampuan metode pendidikan dan pengajaran harus ditingkatkan. Metodik-dedaktik ini sangat diperlukan agar dosen mengerti tentang psikologi mengajar, metode pengajaran, penyiapan bahan pengajaran, metode evaluasi hasil belajar, teknologi pengajaran dan sebagainya. Kemampuan ini akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

Dosen sebagai pendidik memiliki peran membawa misi pembangunan nasional dan sosialisasi serta implementasi wawasan kebangsaan dikalangan perguruan tinggi (mahasiswa). Ini sangat penting untuk menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan landasan konseptual wawasan kebangsaan yaitu wawasan nusantara, sehingga kerawanan sosial, kesenjangan "ipoleksosbudhankam" dapat diperkecil.

Pemberdayaan peranan dosen mendasak untuk dioptimalkan yaitu dengan memberikan deskripsi tugas dan peranan yang lebih dapat diimplementasikan. Dosen se-

cara penuh harus bekerja pada fungsi dan tugasnya untuk mendidik/mengajar, meneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengabdian pada masyarakat.

b. Mahasiswa

Setiap perguruan tinggi dapat meningkatkan daya tampung mahasiswa tanpa harus menurunkan kualitas pendidikan dengan rambu-rambu, rasio dosen dengan mahasiswa yang ditetapkan. Peningkatan daya tampung ini akan diteruskan sehingga angka partisipasi kasar pada pendidikan tinggi mencapai 25% pada akhir pembangunan jangka panjang ke II.

Dalam rekrutmen mahasiswa (baru) perguruan tinggi dapat melakukan dengan berbagai cara baik melalui test obyektif (saringan masuk atau ujian masuk), program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK), program pengembangan potensi bakat dan prestasi calon mahasiswa, dan yang lebih penting adalah bagaimana menjangkau bibit daerah agar nuansa kelindonesiaan memperoleh perhatian setiap perguruan tinggi. Sebagai salah satu alat menciptakan persatuan dan kesatuan serta pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, maka penelusuran potensi daerah sangat diperlukan.

Jika perlu dilakukan dengan perjanjian dan kerjasama dengan instansi terkait agar program penelusuran potensi daerah ini dapat dilakukan. Kerjasama sinergis antara PT dengan Pemerintah Daerah dan atau dengan PT daerah akan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang lebih meningkat. Program ini di PTN sudah dapat berjalan, walaupun belum secara terbuka. Pada perguruan tinggi swasta dapat disebutkan misalnya UMI Ujung Pandang dan UII Yogyakarta (menurut sepengetahuan penulis)

Kepedulian dan disiplin mahasiswa mengikuti program kurikuler dan ko kurikuler dapat ditingkatkan, agar penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek afektif dan psikomotoris dalam proses belajar mengajar dapat dicapai atau diperoleh secara maksimal.

c. Kurikulum

Kurikulum nasional dewasa ini sedang dalam implementasi di perguruan tinggi. Namun demikian implementasi kurikulum segera memperoleh tindakan lanjutan yaitu berupa penetapan silabus perkuliahan, agar standard baku bahan pengajaran dapat dicapai. Keterlambatan masalah silabus ini juga akan menyebabkan tujuan pengembangan kurikulum nasional tidak tercapai secara optimal, apalagi menuju standard pendidikan secara nasional.

Kurikulum yang telah ditetapkan bukan berarti ketetapan final, mengingat pada umumnya selama 5 tahunan akan dilakukan peninjauan kembali untuk melihat tantangan dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Oleh karena itu kurikulum yang akan datang diharapkan lebih mampu memberikan kualifikasi lulusan yang lebih tegas tentang aspek-aspek integritas wawasan kebangsaan dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, aspek keilmuan sesuai dengan disiplin ilmu (program studi) dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (pemakai) dalam pembangunan terutama masyarakat industrialis (dunia usaha).

Integritas kebangsaan menjadi strategis dalam menghadapi era globalisasi dengan keterbukaan pada semua aspek kehidupan bangsa. Dengan tiada lagi batas-batas wilayah secara nyata, akan saling pengaruh mempengaruhi atau terkontaminasi semua aspek kehidupan bangsa

baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Sebuah ilustrasi misalnya, seorang pegawai pemerintah atau dosen ditugaskan belajar di luar negeri, setelah selesai dan memperoleh gelar, mereka tidak mau bekerja di pemerintahan akan tetapi di perusahaan asing atau lebih parah lagi ia tidak kembali ke Indonesia tapi bekerja di luar negeri dan devisa tidak masuk ke Indonesia. Inilah gambaran manusia Indonesia yang memiliki integritas kebangsaan yang rendah.

Sisi lain juga dapat dilihat dari aspek hubungan antar kelompok masyarakat baik secara etnis kedaerahan, suku, atau warna kulit dan sebagainya. Manakala para peserta didik tidak dibekali rasa kebangsaan dalam bentuk wawasan nasional dan doktrin ketahanan nasional dikhawatirkan persoalan kesenjangan, kedaerahan dan sebagainya dapat memicu perpecahan.

Selain itu kurikulum program studi baik muatan nasional maupun muatan lokal harus mengacu pada relevasinya dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Proporsi 60% dan 40% antara kurikulum nasional dengan kurikulum lokal dapat dipertahankan dengan asumsi bahwa dalam kurikulum nasional sudah termasuk di dalamnya kurikulum untuk aspek peningkatan integritas kebangsaan.

Pada sisi lain perlu dipertegas perbedaan antara program pendidikan akademik dan program profesional. Selama ini masih nampak rancu, dan belum jelas arah pengembangannya, sehingga kurikulumnya pun belum mampu diwadahi. Seberapa prosentase kandungan praktis dan kandungan teoritisnya bagi program akademik dan berapa prosentase kandungan praktis dan teoritisnya pada program pendidikan profesional. Belum lagi prosentase porsi kurikulum nasionalnya dan kurikulum lokal pada program pendidikan profesional. Me-

nurut pendapat penulis, pada program pendidikan profesional diharapkan 40% kandungan teoritiknya dan kandungan aspek integritas kebangsaan dari total jumlah kurikulum yang ditetapkan. Sebesar 40% tersebut, semuanya merupakan kewenangan pusat atau merupakan kurikulum nasional, sedang sisanya merupakan kurikulum lokal dan bersifat praktek. Dari pendidikan profesional ini lulusan perguruan tinggi yang dapat diandalkan untuk "siap pakai". Sementara program pendidikan akademik, merupakan lulusan perguruan tinggi yang "siap dikembangkan" untuk menduduki tingkatan manajerial menengah ke atas dan atau studi lanjut.

Kurikulum yang mengandung muatan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan era liberalisasi ekonomi dan perdagangan menjadi sangat penting. Sebab diperlukan daya saing dan keunggulan kompetitif dalam industri dan perdagangan. Untuk memperoleh daya saing dan keunggulan kompetitif, salah satu faktor adalah diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kerja yang tinggi, profesional dan sikap kewiraswastaan yang tinggi. Pengetahuan kewiraswastaan, etos kerja dan profesional, serta pengenalan dunia kerja menjadi sebuah kebutuhan.

Peningkatan kegiatan kemahasiswa yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan tinggi harus ditingkatkan. Berbagai aktivitas yang tidak dapat dilakukan dan disusun dalam kurikulum maupun silabus pengajaran, dapat dilaksanakan melalui kegiatan atau pembinaan kemahasiswaan.

Kegiatan pengembangan dalam aspek penalaran, pengembangan berfikir ilmiah maupun ketrampilan dan kemampuan dalam melakukan kegiatan penelitian, menjadi sangat penting. Usaha ini diharapkan memberikan bekal berharga bagi mahasiswa terdidik di masa depan untuk mampu mengelola sumber daya alam

maupun sumber daya secara inovatif dan kreatif serta dapat dipertanggungjawabkan yang sangat bermanfaat dalam pembangunan.

Perguruan tinggi harus dikembangkan dan diarahkan untuk mendidik mahasiswa agar mampu meningkatkan daya penalaran, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan masa sekarang dan masa depan.

Perguruan tinggi dalam hal ini perlu menyediakan tenaga-tenaga pembimbing dan pembina kegiatan penelitian yang memadai jumlah maupun kualitasnya, baik untuk penelitian pemecahan masalah pembangunan maupun penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir (skripsi).

Kelengkapan laboratorium pendidikan tinggi ditingkatkan dan kegiatan seminar dan diskusi *current issue* dilakukan secara rutin. Bagi mahasiswa kegiatan semacam ini dapat memberi bekal yang kuat bagi pengembangan wawasan ke depan secara bertanggungjawab.

Sarana dan Prasarana

Setiap pendidikan tinggi dituntut mampu menyediakan sebuah kampus yang lengkap dengan gedung untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Gedung administrasi dan pelayanan masyarakat, perpustakaan, laboratorium yang lengkap, "student center", parkir, prasarana dan sarana olah raga serta perumahan para pegawai dan asrama mahasiswa. Tuntutan kampus ini bukan hanya jumlah gedung dan lahan akan tetapi lebih dari itu sebuah kampus yang lengkap

dan berkembang secara terpadu.

Di samping itu sarana dan prasarana pendidikan dapat dikembangkan dengan melengkapi dan meningkatkan alat-alat teknologi pendidikan/ pengajaran, teknologi informasi dan komunikasi global. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut maka kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, serta komunikasi ilmiah di perguruan tinggi dapat dikembangkan secara lebih maksimal.

Komponen Proses Pendidikan

a. Proses Belajar Mengajar

Evaluasi hasil studi mahasiswa selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya, baik evaluasi akhir program studi maupun evaluasi setiap semester dan pada jenjang semester tertentu. Namun yang masih harus memperoleh perhatian adalah evaluasi hasil studi. Ini mengingat bahwa evaluasi hasil studi terutama evaluasi hasil studi pada setiap akhir semester, lebih banyak ditentukan oleh hasil ujian tengah semester maupun hasil ujian akhir semester. Evaluasi belum banyak yang memberikan bobot tertentu terhadap aktivitas mahasiswa di dalam proses belajar mengajar dan atau tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga belum mengukur kemampuan mahasiswa yang sebenarnya.

Evaluasi hasil studi ditingkatkan dengan memberikan standarisasi alat evaluasi dan pembobotan terhadap hasil karya mahasiswa secara keseluruhan. Standarisasi ditentukan berdasar muatan bahan kuliah bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik serta pembobotan terhadap aktivitas yang dilakukan mahasiswa pada kurikulum setiap mata kuliah.

Di samping itu yang harus memperoleh perhatian setiap perguruan tinggi adalah

evaluasi terhadap proses pendidikan dan evaluasi setelah proses pendidikan dilaksanakan. Masih sedikit perguruan tinggi (kalau tidak dikatakan belum ada) yang menyelenggarakan aktivitas evaluasi pendidikan ini dalam program kerja ataupun kelembagaan. Evaluasi ini untuk mengukur dan mengevaluasi apakah proses belajar mengajar telah berjalan dengan sempurna baik pencapaian target kurikulum maupun silabus perkuliahan atau kualitas proses belajar mengajar. Di samping itu juga evaluasi setelah proses belajar mengajar diselesaikan apakah lulusan (hasil pendidikan) telah terserap di dunia kerja secara cepat dan terserap secara relevan dengan program studi lulusan yang bersangkutan.

Hasil evaluasi ini sangat berharga bagi perguruan tinggi sebagai upaya umpan balik terhadap kebijaksanaan, strategi dan program perguruan tinggi, agar perguruan tinggi benar-benar mampu menghasilkan manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan yang terserap secara relevan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan ke depan.

b. Penelitian

Sebagai sebuah perguruan tinggi mempunyai tugas memelihara; mengembangkan dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas ini akan dapat terlaksana dengan baik manakala civitas akademiknya melakukan suatu pengkajian dan penelitian dengan baik. Perguruan tinggi harus mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan praktis maupun pengembangan ilmu dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan. Hasil dari kegiatan ini secara simultan merupakan bahan yang sangat berharga bagi sebuah perguruan tinggi yaitu dalam rangka mendukung pengembangan lebih lanjut pada pelaksanaan darma pen-

didikan maupun darma pengabdian pada masyarakat.

Sejalan dengan hal itu perguruan tinggi harus mampu menghasilkan karya penelitian untuk pengembangan IPTEK maupun untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Usaha ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga peneliti (dosen), penyediaan waktu dan dana yang memadai dan yang lebih penting adalah pengembangan perilaku menjadi perilaku akademik, inovatif dan kreatif serta sikap ilmiah (skeptis, kritis dan analitis) pada seorang dosen dalam setiap kesempatan.

Untuk memperoleh sinergi dalam kegiatan penelitian pada kerja sama antar institusi penelitian dan pengembangan maupun pengkajian sangat diperlukan. Efektivitas dan efisiensi kegiatan penelitian harus ditingkatkan, dengan melakukan pertukaran dan pengembangan informasi penelitian di kalangan lembaga pendidikan dengan lembaga penelitian dan pengembangan setiap departemen maupun non departemen. Dunia usaha dapat bekerjasama dengan saling menguntungkan dengan perguruan tinggi agar diperoleh hasil penelitian dan pengembangan produk dan jasa dengan investasi yang lebih murah dan efisien serta tercapai sinergis antara lembaga pendidikan tinggi dengan dunia usaha dapat tercipta dengan saling mendukung kebutuhannya masing-masing.

Koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi nasional terhadap kelembagaan dan kegiatan penelitian perlu dilakukan agar dalam aplikasi program dapat saling memiliki sasaran dan spesialisasi serta kedalaman dalam pengkajian lebih dapat dioptimalkan dengan saling memberi dan menerima antara lembaga penelitian dan pengembangan yang ada, baik yang berada di perguruan

tinggi maupun di departemen, non departemen dan dunia usaha. Dengan demikian hasil dapat maksimal dengan inventasi dan pembiayaan yang dapat ditekan.

c. Pengabdian pada Masyarakat

Disini peran Civitas akademika (dosen, mahasiswa) harus menjadi pionir dan penggerak pembangunan masyarakat sekitarnya, baik melalui program pelatihan, pemecahan masalah pembangunan, inovasi-inovasi untuk kemajuan, memberikan motivasi berswadaya dalam pembangunan, program Kuliah Kerja Nyata, dan lain sebagainya.

Program pengabdian pada masyarakat hendaknya dilakukan bukan saja bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi juga bermanfaat bagi perguruan tingginya, serta lebih-lebih bagi mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Bagi mahasiswa dan dosen akan lebih tertanam pengertian dan pemahaman terhadap arti pembangunan nasional, integritas kebangsaan, kesetiakawanan sosial dan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga akan tercipta Sumber Daya Manusia yang memiliki wawasan kebangsaan yang dalam.

Program KKN hendaknya diperluas menuju sasaran wilayah antar propinsi dan jikalau perlu mendampingi program inpres desa tertinggal. Wawasan nasional bagi dosen dan mahasiswa harus lebih ditanamkan yang bertujuan pada peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Program lain yang dapat dikembangkan dalam rangka pembinaan civitas akademika adalah program peninjauan obyek penting dan strategis (POPS). Program ini sangat mendukung upaya peningkatan pengetahuan, pengertian dan pemahaman arti pembangunan tersebut dalam kaitan juga pemantapan integritas kebangsaan civitas akademika.

Kelembagaan

Perguruan tinggi harus mampu dikelola secara "profesional tanpa komersial". Artinya manajemen modern dapat diaplikasi agar memperoleh pelayanan dan kegiatan tri darma perguruan tinggi yang efektif dan efisien. Jadi sasarannya bukan keuntungan maksimum akan tetapi pelayanan dan kualitas pendidikan yang maksimum. Dengan sarana dan prasarana teknologi yang lebih modern akan diperoleh proses manajemen yang lebih cepat, tepat, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi perguruan tinggi tetap dapat mengacu pada PP 30 1990 tentang Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tingginya. Yang diperlukan dalam pengembangan perguruan tinggi secara manajerial dan organisatoris adalah otonomi pengelolaan perguruan tinggi.

Secara lebih khusus pembinaan terhadap PTS, diperlukan standarisasi hubungan dan mekanisme organisasi antara yayasan penyelenggara/pendiri dengan badan pelaksana harian (BPH) yayasan serta dengan pimpinan PTS sangat diperlukan. Untuk menghadapi "persaingan" pengelolaan PTS ke depan akan sangat terganggu kalau masalah ini tidak diselesaikan, sehingga perguruan tinggi yang diharapkan lebih memikirkan pengelolaan dan pelaksanaan tri darma secara lebih berkualitas dan diharapkan tidak terganggu oleh persoalan-persoalan klasik yaitu berbenturan dengan yayasan penyelenggara dengan pimpinan PTS.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dengan pengembangan dan pembinaan PTS adalah mengenai sumber dana.

Kebijaksanaan dan Strategi

Dalam rangka peningkatan peranan perguruan tinggi dalam pengembangan

SDM berwawasan kebangsaan, maka diperlukan kebijaksanaan dan strategi yang dapat dilakukan atau diambil baik oleh dan pada tingkat pemerintah (supra struktur), yayasan penyelenggara perguruan tinggi, maupun pimpinan perguruan tinggi (sebagai infra struktur) sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tanggung jawab seperti model sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dikeluarkan Dirjen Dikti Depdikbud.

Pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c/q Direktorat Jenderal Pendidikan selaku pembina dan sekaligus penyelenggara perguruan tinggi dan Departemen yang lain yang terkait dan terutama sebagai penyelenggara perguruan tinggi. Sementara itu yayasan penyelenggara perguruan tinggi dan pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan kebijaksanaan dan strategi peningkatan peranan perguruan tingginya.

Kebijaksanaan

Dalam rangka peningkatan manajemen perguruan tinggi agar lebih mampu dalam mengembangkan SDM berkualitas berwawasan kebangsaan terutama dalam menghadapi abad XXI, diperlukan kebijaksanaan utama yaitu: **penataan dan pemberdayaan**

a. Penataan

Kebijaksanaan ini untuk menciptakan kondisi perguruan tinggi yang dapat memberikan suasana yang mampu memberikan peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi. Di samping kebijaksanaan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi dan produktivitas komponen pendidikan, proses pendidikan dan kelembagaan.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemanfaatan komponen pendidikan, proses pendidikan dan kelembagaan agar diperoleh efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi.

Dengan kedua kebijaksanaan tersebut diharapkan perguruan tinggi mampu menghasilkan SDM berkualitas berwawasan kebangsaan secara optimal.

Strategi dan Upaya

Untuk mewujudkan kedua kebijaksanaan tersebut beberapa strategi dan upaya yang dapat dilakukan di antaranya sebagai berikut.

a). Peningkatan Peranan Dosen

- (1). Reorientasi peranan dosen ini sebuah tuntutan yang mendesak agar pendidikan dan hasil pendidikan di Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain. Disadari bahwa kemampuan dosen dilihat dari sisi kemampuan akademik maupun kewenangan akademik masih rendah. Keadaan ini "diperparah" lagi oleh kenyataan bahwa para dosen yang memiliki kemampuan dan/atau kewenangan akademik yang cukup tinggi banyak "dikaryakan" pada birokrasi maupun pada institusi bisnis. Dengan demikian kesempatan atau waktu untuk mengajar dan meneliti sangat rendah dan akhirnya peranannya digantikan oleh dosen junior lagi.
- (2). Kewenangan akademik dan kemampuan akademik harus diklarifikasi posisinya dalam mengukur mutu dosen. Harus jelas dan yang lebih penting atau prioritas yang mana antara jabatan akademik dengan tingkatan strata pendidikan (gelar). Pengembangan dosen, baik dari sisi kewe-

nangan maupun kemampuan akademik harus ditingkatkan.

- (3). Peningkatan mutu dosen, tentu saja harus simultan dengan peningkatan kesejahteraan, karena bagaimanapun juga jika dosen masih hidup "marjinal" maka dosen akan "terganggu". Mereka akan dapat meninggalkan tugas utama (paling tidak mengurangi intensitas) akan mencari alternatif pekerjaan lain di luar/di instansi lainnya. Pendapatan dan kesejahteraan dosen ditingkatkan agar mencapai biaya hidup layak bagi dosen yang memiliki kewenangan dan/atau kemampuan akademik tertentu.
- (4). Pemberian penghargaan baik yang bersifat material maupun non material bagi dosen yang sangat berprestasi dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi, dan terutama yang mampu menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional.
- (5). Debirokratisasi mekanisme dan prosedur perolehan jabatan akademik sebagai tingkat kewenangan akademik seseorang dosen dapat segera terwujud. Kelancaran mekanisme dan prosedur akan memberikan dorongan kuat bagi dosen untuk mengurus atau mengajukan perolehan dan atau peningkatan jabatan akademik.
- (6). Disediakan anggaran penelitian yang memadai agar dosen mau, senang dan termotivasi melakukan kegiatan penelitian baik dalam rangka pengembangan, penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi baru maupun penelitian dalam rangka pemecahan masalah praktis yang diperlukan masyarakat dan pembangunan nasional.

b). Kurikulum

- (1). Kurikulum hendaknya selalu ditinjau secara periodik dalam kurun waktu

maksimal 5 tahun. Ini dimaksudkan agar pendidikan tinggi mampu fleksibel menjawab kebutuhan jaman, terutama di bidang ekonomi dan bisnis dengan kecepatan perkembangan yang sangat tinggi.

- (2). Kurikulum disusun berdasar kebutuhan muatan integritas kebangsaan dan muatan keilmuan program studi yang ditetapkan secara nasional dan muatan kebutuhan globalisasi diserahkan pada otonomi perguruan tinggi.
- (3). Penataan dan pemilihan kurikulum pendidikan Akademik dan pendidikan Profesional harus segera ditetapkan agar jelas perbedaan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- (4). Penyusunan kurikulum melibatkan unsur-unsur dari PTN, PTS, Depnaker dan KADIN.
- (5). Khusus bagi PTS, maka mata ujian negara bagi PTS ditetapkan secara nasional, mata kuliah lokal tidak perlu diujikan dalam ujian negara, agar fleksibilitas penyusunan KURLOK dapat dirasakan manfaatnya.
- (6). Proporsi muatan teoritik dan muatan praktek (laboratorium, ketrampilan dsbnya) bagi program akademik harus jelas 70% teoritik dan 30 praktek, misalnya. Sementara itu pada program profesional ditetapkan 40% teori dan 60% praktek.
- (7). Mata kuliah dasar umum perlu ditingkatkan jumlah dan intensitas pendidikan. Ditinjau dan dikembangkan mata kuliah MKDU yaitu Agama, Pancasila, Kewiraan, IBD, IAD menjadi Agama, Pancasila, Wawasan Nusantara/ Bela Negara dan Ketahanan Nasional.

c). Mahasiswa

- (1). Daya tampung perguruan tinggi harus ditingkatkan baik di PTN maupun

PTS, agar pemerataan perguruan tinggi dapat diwujudkan. Angka partisipasi kasar (APK) dapat ditingkatkan dan sasaran APK 25% pada akhir PJP II dapat tercapai.

- (2). Rekrutmen mahasiswa di perguruan tinggi harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi calon peserta didik yang berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, bertempat tinggal di daerah (kesempatan bagi wawasan keIndonesiaan) dan dalam rangka pembinaan atlet nasional sesuai dengan amanah GBHN 1993.
- (3). Peningkatan mutu aktivitas kemahasiswaan, baik bersifat kurikuler dan maupun co-kurikuler harus mampu mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan integritas pendidikan dan wawasan kebangsaannya.
- (4). Program "transmigrasi mahasiswa" atau dengan bahasa lebih halus adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi terutama perguruan tinggi antar pulau.
- (5). Pola beasiswa dapat ditingkatkan dan diberikan ketetapanannya kepada anak didik di SMA kelas III yang berprestasi, strategi ini dipergunakan agar anak didik yang akan lulus SMA dapat memastikan diri dapat membiayai untuk studi di perguruan tinggi dengan jaminan adanya beasiswa (terutama beasiswa dari pemerintah dan Supersemar atau GN, OTA). Pemberian beasiswa juga berlaku bagi calon peserta didik dari daerah untuk studi di daerah lain.
- (6). Pemberian muatan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa dilakukan pada awal mahasiswa mengikuti kuliah, dipertengahan masa studi maha-

siswa dan pemanfaatannya di masa terakhir mahasiswa akan menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

- (7). Pengembangan penelitian dan penulisan karya ilmiah serta ketrampilan praktis ditingkatkan dengan meningkatkan peranan dosen selaku pembimbing akademik mahasiswa.

d). Sarana dan Prasarana

- (1). Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, pusat bahasa dsbnya) harus dilakukan agar mampu mendukung proses belajar yang mampu menghasilkan lulusan berkualitas terutama berkaitan dengan aspek psikomotorik dan pengalaman praktik kerja. Sarana dan prasarana praktek kerja ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan SDM pada era industrialisasi dan liberalisasi perdagangan.
- (2). Pengadaan sarana pendidikan dengan teknologi "canggih" sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Di masa depan metode pendidikan dengan teknologi "canggih" menjadi "trend" persaingan penyelenggaraan pendidikan tinggi, misalnya pendidikan jarak jauh baik menggunakan barang cetakan maupun internet, "teleconference" dan sebagainya.
- (3). Pemberian ruang dan waktu mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan manajerial lainnya.

e). Proses Belajar Mengajar (PBM)

- (1). Peningkatan kualitas PBM harus terus dilakukan, baik tatap muka dosen mahasiswa, tugas mandiri, pencapaian

silabus kurikulum, praktek laborat serta evaluasi studi mahasiswa.

- (2). Mengembangkan teknologi pengajaran yang efektif dan efisien. Alat peraga, pembahasan kasus sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing program studi, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dan mendesak. Pemerintah harus memberikan apresiasi terhadap masalah ini, mengingat tuntutan dan tantangan ke depan harus diantisipasi secara kritis.
- (3). Dalam rangka penyiapan SDM berkualitas pada abad XXI, suka dan tidak suka kita harus mampu "bersaing" dengan SDM dari negara lain. SDM negara lain telah banyak menyiapkan diri sejak dini dengan kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan penguasaan bahasa asing (Inggris misalnya) serta adaptasi dengan lingkungan kerja. Perguruan tinggi dan pemerintah harus mengapresiasi usaha-usaha menciptakan unggulan pendidikan tinggi baik melalui kuliah berbahasa asing, kuliah praktek kerja maupun bentuk kelas internasional.
- (4). Budaya baca dan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dan asing dikembangkan dan ditingkatkan secara maksimal dan jikalau mungkin diwajibkan.
- (5). Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, pusat bahasa dan sebagainya) dilakukan secara optimal, sehingga aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam pendidikan dapat diperoleh mahasiswa secara maksimal.
- (6). Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kuliah dilaksanakan dengan pemanfaatan disiplin absensi, dengan

masing-masing memiliki konsekuensi baik bagi dosen maupun bagi mahasiswa.

- (7). Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium/pusat bahasa dan fasilitas lainnya) untuk menyelenggarakan penataran/ kursus dan sejenisnya untuk meningkatkan kognisi, afektif dan psikomotorik mahasiswa dan masyarakat.

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

- (1). Kegiatan dan anggaran penelitian dan pengabdian di tingkatkan dan mengajak peran serta dunia usaha dalam program riset bersama dan riset unggulan untuk menentukan konsep, pelaksanaan, dan alat evaluasi.
- (2). Pusat Informasi hasil Riset dan Pengembangan Nasional perlu diwujudkan sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan transformasi serta mobilisasi IPTEK.
- (3). Perlaksanaan KKN dan KKK ditingkatkan dengan bekerja sama dengan Dunia Usaha dan lapangan pekerjaan lainnya.
- (4). Pembinaan metodologi dan kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan dosen dilakukan secara terus menerus dan berjenjang.
- (5). Dilaksanakan standarisasi hasil karya dosen dalam penelitian dan karya ilmiah, misal bahwa selama 1 tahun seorang dosen harus meneliti dan menulis di jurnal ilmiah minimal sekian penelitian/jurnal.
- (6). Pengabdian masyarakat dilaksanakan baik mengacu kebutuhan pembangunan misalnya bentuk KKN, dan kebutuhan wawasan dunia kerja dengan kerja praktek atau magang dan bila memungkinkan diselenggarakan penin-

jauan obyek penting.

- (7). Program pembinaan generasi muda (pemuda) yang tidak mampu atau dapat memasuki dunia perguruan tinggi sangat strategis baik bagi pelaksanaan pembangunan maupun menghindari kesenjangan antara generasi muda (mahasiswa dan pemuda). Dengan demikian program penataran generasi muda di kampus menjadi sangat penting.
- (8). Kesempatan generasi muda masuk kampus dalam bentuk berbagai penataran dan atau kursus sesuai dengan kebutuhan generasi muda yang belum mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Kelembagaan

- (1). Pembinaan perguruan tinggi perlu koordinasi secara sinergis antara Depdikbud dengan Dapnaker dalam bentuk antara lain; penataan jenis pendidikan dan latihan yang memungkinkan terjadi pembinaan tunggal dan efisiensi investasi dalam pendidikan. Pendidikan profesional dalam bentuk latihan kerja dan kursus yang selama ini dibina oleh Depnaker dapat dibina oleh Depdikbud dengan program Diploma dan atau Politeknik.
- (2). Otonomi pengelolaan perguruan tinggi segera diimplementasikan agar efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat lebih meningkat. Otonomi tidak saja perlu hanya di bidang akademik, akan tetapi juga pengelolaan dana dan sumber daya lainnya. Dengan otonomi perguruan tinggi akan mengurangi anggaran pemerintah yang dapat dipergunakan untuk program iptek yang lainnya, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dapat ditingkatkan dalam peningkatan peranan perguruan tinggi.

- (3). Badan Akreditasi Nasional diperluas ruang lingkup kerjanya, menambah personalia anggota dan staf administrasi maupun Satgas-satgas dan Pokja-pokjanya untuk menjangkau akreditasi semua perguruan tinggi baik PTN,PTA,PTK maupun PTS.
- (4). Agar diperoleh manajemen dan pelayanan pendidikan tinggi secara profesional, maka rekrutmen pimpinan perguruan tinggi tidak saja mendasarkan pada kewenangan dan atau kemampuan akademik dosen akan tetapi diperlukan persyaratan manajerial. Kemampuan manajerial ini dapat diperoleh dari pengalaman memimpin dan atau dilakukan pendidikan atau sekolah yang diselenggarakan untuk itu, baik oleh pemerintah maupun perguruan tingginya masing-masing.
- (5). Secara khusus bagi penyelenggaraan PTS, maka beberapa strategi dan upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan diantaranya: (a) pengembangan program penggalan dana (*fund raising*) dengan memberikan kesempatan Yayasan Penyelenggara PTS (YP-PTS) dapat melakukan investasi bisnis langsung dan oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang tentang Yayasan terutama yang mengatur tentang YP-PTS tersebut; (b) perlu adanya keluwesan bagi PTS untuk dapat membentuk struktur organisasi yang lebih efektif, efisien dan sinergis yang kesemuanya tidak harus seperti yang tercantum dalam PP/30 Tahun 1990; (3) hubungan antara YP-PTS, BP-PTS dan Pimpinan PTS harus dilakukan standarisasi agar energi masing-masing kelembagaan tersebut dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya masing-masing, sehingga terjauhkan dari adanya *miss-management*.
- (6). Secara bersama-sama dibicarakan antara Depnaker dan Depdikbud. Penataan Perguruan Tinggi ini baik menyangkut perijinan dan fasilitas latihan yang ada di Depnaker dapat digunakan oleh Depdikbud untuk mendukung program diploma di politeknik.

Kesimpulan

- a. Pada unsur-unsur pokok penyelenggaraan (manajemen) perguruan tinggi yaitu dosen, mahasiswa, kurikulum, proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kelembagaan perguruan tinggi masih harus ditingkatkan dapat mewujudkan SDM berkualitas berwawasan kebangsaan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi, kaitannya dengan lapangan pekerjaan sikap dan tata laku yang diamati kaitannya dengan manusia dan masyarakat yang diharapkan.
- b. SDM berkualitas yang berwawasan kebangsaan yang diharapkan menjadi keluaran perguruan tinggi adalah memiliki kualifikasi minimal. Kualifikasi tersebut adalah kualitas spiritual, kualitas pribadi, kualitas kebangsaan dan kualitas kekarya.
- c. Dengan memperhatikan kebutuhan kualifikasi SDM pada era abad XXI, maka kebijaksanaan dalam rangka peningkatan manajemen perguruan tinggi yang dapat dilakukan adalah penataan dan pemberdayaan. Penataan dan pemberdayaan melalui peningkatan peranan dosen, mahasiswa, kurikulum, sarana dan prasarana, proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ke-

lembagaan sebagai wahana utama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

- d. Kebijakan dan strategi yang sangat menentukan peranan perguruan tinggi dan menjadi prioritas adalah manajemen dan pembinaan perguruan tinggi, peranan dosen, mahasiswa dan kurikulum. ●

Daftar Pustaka

- Adjiwan, 1995, *Peran Tradisi dan Disiplin untuk mengakar Nilai-Nilai Wawasan Nusantara*, TASKAP KSA-V, Lemhannas Jakarta.
- Bambang Soehendro, 1966, *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang: 1996-2005*, Dirjen. Dikti.Dikbud., Jakarta.
- B.P.7 Pusat, 1994, *Bahan Penataran P-4 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta.
- B.P.7 Pusat, 1995, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1990, *Peraturan Pemerintah RI No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi Depdikbud*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996, *Informasi Direktur PTS, Rapim PTN - Kopertis Seluruh Indonesia*, tanggal 24 - 25 Mei 1996, Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta.
- H.A.R. Tilaar, 1966, *Pendidikan Tinggi di Indonesia Dewasa ini Menghadapi tantangan Abad XXI*, Seminar Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menjua Kualitas GkobaI, Universitas Merdeka Malang.
- Joetata Hadihardaja, 1996, *Profesionalisme dalam Pengelolaan PTS*, Direktur Perguruan Tinggi Swasta, Dirjen. Dikti, Depdikbud, Jakarta.
- Kopertis Wilayah V DIY, 1997, Laporan Tengah Tahunan Kopertis V Tahun 1996/1997, Yogyakarta.
- , *Himpunan Keputusan Menteri tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana*, Yogyakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional 1991, *Pedoman Penyusunan Taskap*, Jakarta.
- Lembaga Ketahanan Nasional 1997, *Bahan-bahan SUSPIM PTSI-I LEMHANNAS*, Jakarta.
- Moetojib, 1994, 'Sistem Manajemen Pendidikan dan Latihan dalam rangka Memperoleh Sumber Daya Manusia yang profesional', *Majalah Komunikasi dan Informasi Ketahanan Nasional*, No. 60, Lemhanas, Jakarta.
- PT. Kreasi Jaya Utama, 1989, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Syahrir, 1995, *Peran Generasi Muda dalam Mengimplementasikan Wawasan Nusantara*, TASKAP KRA-XXVIII, Lemhannas, Jakarta.
- Rachmad Wahab, 1996, *Kualitas Pendidikan Persekolahan: Harapan Kenyataan dan Tantangan*, Seminar IKIP, Yogyakarta.
- Tim Lembaga Penelitian, 1996, *Kondisi Perguruan Tinggi Indonesia Menyongsong Globalisasi: Beberapa Temuan Penelitian*, Seminar Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menjua Kualitas Global, Universitas Merdeka Malang.
- Tim Penyusun, 1995, *Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia: Bahan Penataran P-4*, Yayasan Swadaya, Jakarta.
- Tim Penyusun, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikbud dan Balai Pustaka*, Jakarta.
- Wahyutomo, 1995, *Manajemen Perguruan*

- Tinggi pada Era Global: Suatu Gagasan Menuju Efisiensi*, Universitas Merdeka Malang bekerja sama dengan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- WP. Napitupulu, 1996, *Kondisi Mutu Pendidikan Tinggi di Negara-Negara Asia Pasifik*, Seminar Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global, Universitas Merdeka Malang.
- Yudo Swasono, 1996, *Kualitas Alumni Perguruan Tinggi dan Kemampuan Daya Serapnya di Dunia Kerja*, Seminar Mempersiapkan Mutu Pendidikan Tinggi Menuju Kualitas Global, Universitas Merdeka Malang.
- Zarkasih Nur, 1994, 'Aktualisasi Sistem Pendidikan Nasional untuk Mewujudkan Kemandirian', *Majalah Komunikasi dan Informasi Ketahanan Nasional No. 61*, Lemhannas, Jakarta.

